



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No.7741/ KOM-D/SD-S1/2026

**PENGELOLAAN WEBSITE POLDA RIAU DALAM
MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI
HUKUM DAN KEAMANAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi(S.I.Kom)

Oleh :

FANI ADE SAPUTRA

NIM. 12240315193

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2026

**Hak Cipta Uinraungi uangang-unaang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGELOLAAN WEBSITE POLDA RIAU DALAM MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI HUKUM DAN KEAMANAN

Disusun oleh :

Fani Ade Saputra
NIM. 12240315193

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 18 Desember 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Musfjaldy, S.Sos, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fani Ade Saputra
NIM : 12240315193
Judul : Pengelolaan Website Polda Riau Dalam Mempublikasikan Informasi Hukum Dan Keamanan

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Januari 2026

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Mardin, M.A
NIP. 19660620 200604 1 015

Penguji III,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

Sekretaris/ Penguji II,

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Penguji IV,

Intan Kemala, S.Sos, M.Si
NIP. 19810612 200801 2 017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta diumumkan atau uang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fani Ade Saputra
NIM : 12240315193
Judul : Pengelolaan Website Polda Riau dalam Mempublikasikan Informasi Hukum dan Keamanan

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Mustafa, S. Sos., M.I. Kom
NIP. 198108162023211012

Penguji II,

Intan Kemala, S. Sos., M. Si
NIP. 198106122008012017



Hak Cipta Uinmuangi uncaug-uncang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FANI ADE SAPUTRA

NIM : 12240315193

Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Mulya, 06 Maret 2004

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PENGELOLAAN WEBSITE POLDA RIAU DALAM MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI HUKUM DAN KEAMANAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



[Signature]

FANI ADE SAPUTRA
NIM. 12240315193

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 di-
 Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Fani Ade Saputra
 NIM : 12240315193
 Judul Skripsi : Pengelolaan Website Polda Riau Dalam Mempublikasikan Informasi Hukum Dan Keamanan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk Ujian Munaqasyah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
 NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Musfialdy, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721201 200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Fani Ade Saputra

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul : Pengelolaan website polda riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan kepada masyarakat. Website kepolisian merupakan media komunikasi publik yang berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi, transparansi, serta edukasi hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan website Polda Riau. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan website Polda Riau telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pembaruan konten informasi hukum dan keamanan belum dilakukan secara konsisten, interaktivitas website masih terbatas, dan fungsi edukasi hukum belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi pengelolaan website agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai media komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan website, kepolisian, informasi hukum dan keamanan, komunikasi digital, e-government



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Fani Ade Saputra

Dapertement : Communication

Title : MANAGEMENT OF THE RIAU REGIONAL POLICE WEBSITE IN PUBLISHING LEGAL AND SECURITY INFORMATION

This study aims to analyze the management of the Riau Regional Police website in disseminating legal and security information to the public. The police website is a public communication medium that plays a crucial role in supporting information disclosure, transparency, and legal education in the digital era. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation with informants directly involved in managing the Riau Regional Police website. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of the Riau Regional Police website has been running, but is not yet fully optimized. Legal and security information content updates have not been consistently updated, website interactivity is still limited, and the legal education function has not been optimally utilized. Therefore, improvements are needed to improve the website management strategy so that it can function more effectively as a public communication medium that is informative, educational, and easily accessible to the public.

Keywords: website management, police institution, legal and security information, digital communication, e-government.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Alla SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selesaiannya penulisan skripsi dengan judul “pengelolaan website polda riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan” yang dimana skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah untuk menyelesaikan program studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada penulisan dan materi mengingat kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Terima Kasih Terutama kedua orang tua penulis ayahanda BUSRAH dan ibunda MANISEM yang tak henti-hentinya mendoakan, memotivasi dan memenuhi kebutuhan penulis baik secara moril dan materi dengan tulus kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih :

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Leny Nofianti MS, SE, M.Si,Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D, Dr.Alex Wenda, ST, M.Eng, Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr.Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. M.Badri, M.Si, Dr. Titi Antin,M.Si dan Dr. Sudianto, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr.Musfialdy, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Ibu Dr. Tika Mutia, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan bantuan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi
6. Ibu Darmawanti, S.I.Kom., M.I.Kom selaku pensehat akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga kepada penulis, dan seluruh staf serta karyawan yang telah memberikan pelayanan yang layak selama perkuliahan
8. Polda Riau yang telah memeberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkhususnya humas polda riau.
9. Juga kepada Abang dan Kakak kandung penulis Ahmad Saudi, Slamet Juman Dan Dewi Murniati yang secara tidak langsung juga turut menyemangati penulis dalam membuat skripsi sehingga penulis dapat penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Bapak Antoni, Ibu eer, Ibu Jur, Kak Umil, Kak Eva, Kak Nurul, Ibuk Mida, Ibuk jur, Ibuk Devi, Bapak Rudi, serta seluruh keluarga besar humas polda riau yang telah membantu, mempermudah dan meluangkan waktunya untuk penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keluarga besar Cucu Nursalam family yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

12. Teman seperjuangan dan Sahabat Tobat pas puasa yang selalu menyemangati dan sama-sama berjuang dalam proses menyelesaikan skripsi, Augideo Anugerah Mufaddhal, Abriansyah Putra, Heri Arya Dwi Putra, Muhammad Muklis, Zul Ihsan, Reza Nurdiansyah, Amalludin Nur, Jamaludin, Gabriel Hamala W, Zikra Mahendra, Alif Bilhaq.

13. Kepada orang yang sangat saya cintai, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Asiatunnur Nst, S.Ip, yang telah menjadi sosok penting dan rumah dalam perjalanan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran, pengertian, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah terputus, baik dalam bentuk doa, motivasi, maupun semangat yang senantiasa diberikan di setiap tahap penulisan.

14. Kelas PR A angkatan 2022 yang telah membuat penulis nyaman dan senang berada di kelas selama beberapa tahun menjadi teman satu kelas

15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Berbagai tantangan, keterbatasan, dan rasa lelah yang dihadapi mampu dilalui dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Proses ini menjadi pembelajaran berharga dalam mengembangkan kedisiplinan, ketekunan, serta kemampuan berpikir kritis. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan memberikan manfaat di masa mendatang.

**Pekanbaru, 18 Desember
2025**

**Fani Ade Saputra
(12240315193)**



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.2.1 Pengelolaan	4
1.2.2 Website.....	4
1.2.3 Polda Riau	4
1.2.4 Mempublikasikan	4
1.2.5 Informasi dan Hukum	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Manfaat Teoritis	5
1.5.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Teori Manajemen Konten Pemerintah	11
2.2.2 Teori Komunikasi Digital	13
2.3 Konsep Pengelolaan Website Polda Riau sebagai Website Pemerintah	14
2.4 Konsep Website Pemerintah	17
2.4.1 Pengertian Website Pemerintah	17
2.4.2 Fungsi Website Pemerintah.....	17
2.4.3 Karakteristik Website Pemerintah Ideal.....	18
2.5 Kerangka Berfikir	18
2.6 Konsep Operasional	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	22
3.3 Subjek Informan Penelitian.....	22
3.3.1 Kriteria Informan	22
3.4 Sumber Data.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informasi Penelitian	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6.1 Wawancara Mendalam	24
3.6.2 Observasi	24
3.6.3 Dokumentasi	24
3.7 Teknik Keabsahan Data	24
3.8 Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 26

4.1 Sejarah Media Center Polda Riau	26
4.2 Tugas dan Fungsi Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau..	29
4.2.1 Peran Bidang Humas Dalam Publikasi Digital	29
4.3.2 Kewenangan Pengelolaan Website Polda Riau.....	29
4.3 Alur Pengelolaan Website Polda Riau	30
4.3.1 Proses Pengelolaan Informasi Hingga Publikasi.....	20
4.3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Website	30

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

5.1 Hasil Penelitian	32
5.2 Pembahasan.....	42

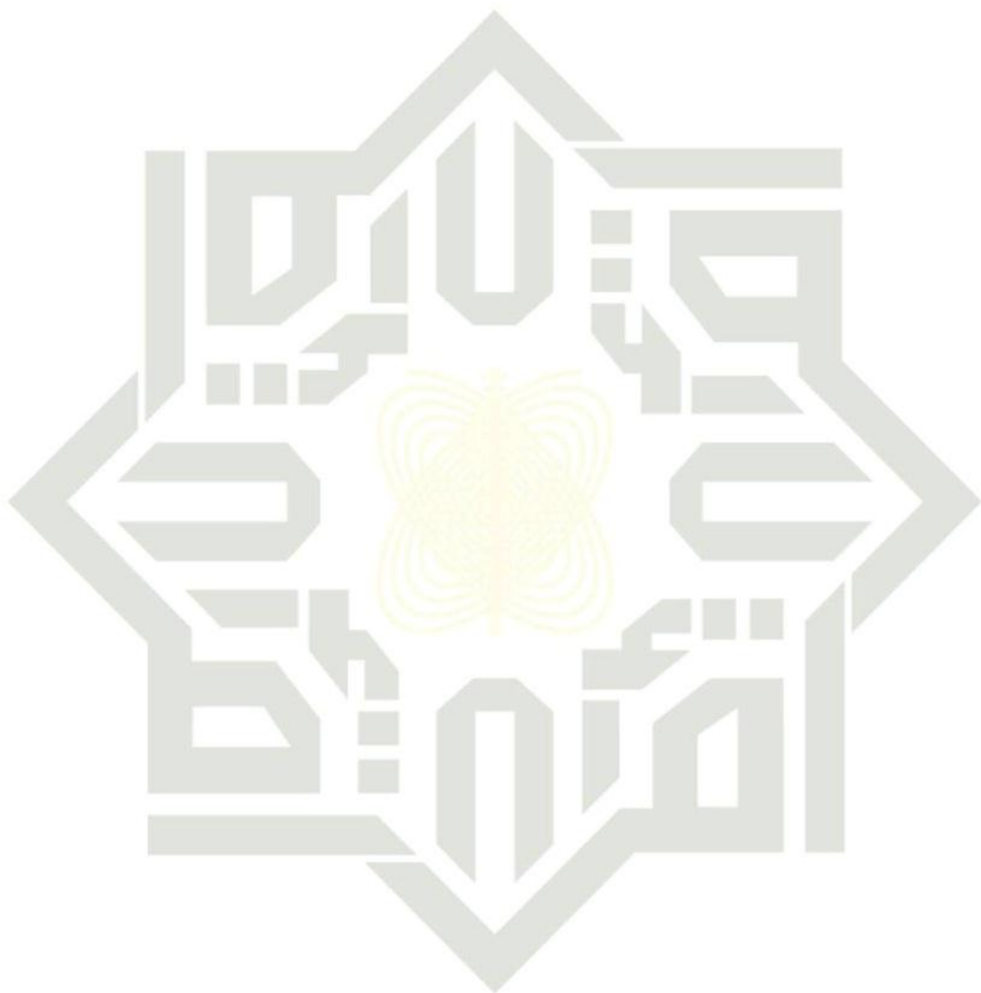
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 47

6.1 Kesimpulan	47
6.2 Kontribusi Ilmia Penelitian	47
6.3 Keterbatasan Penelitian	48
6.4 Arah Penelitian Selanjutnya.....	48
6.5 Saran.....	48
6.5.1 Saran Praktis.....	48
6.5.2 Saran Akademik	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL



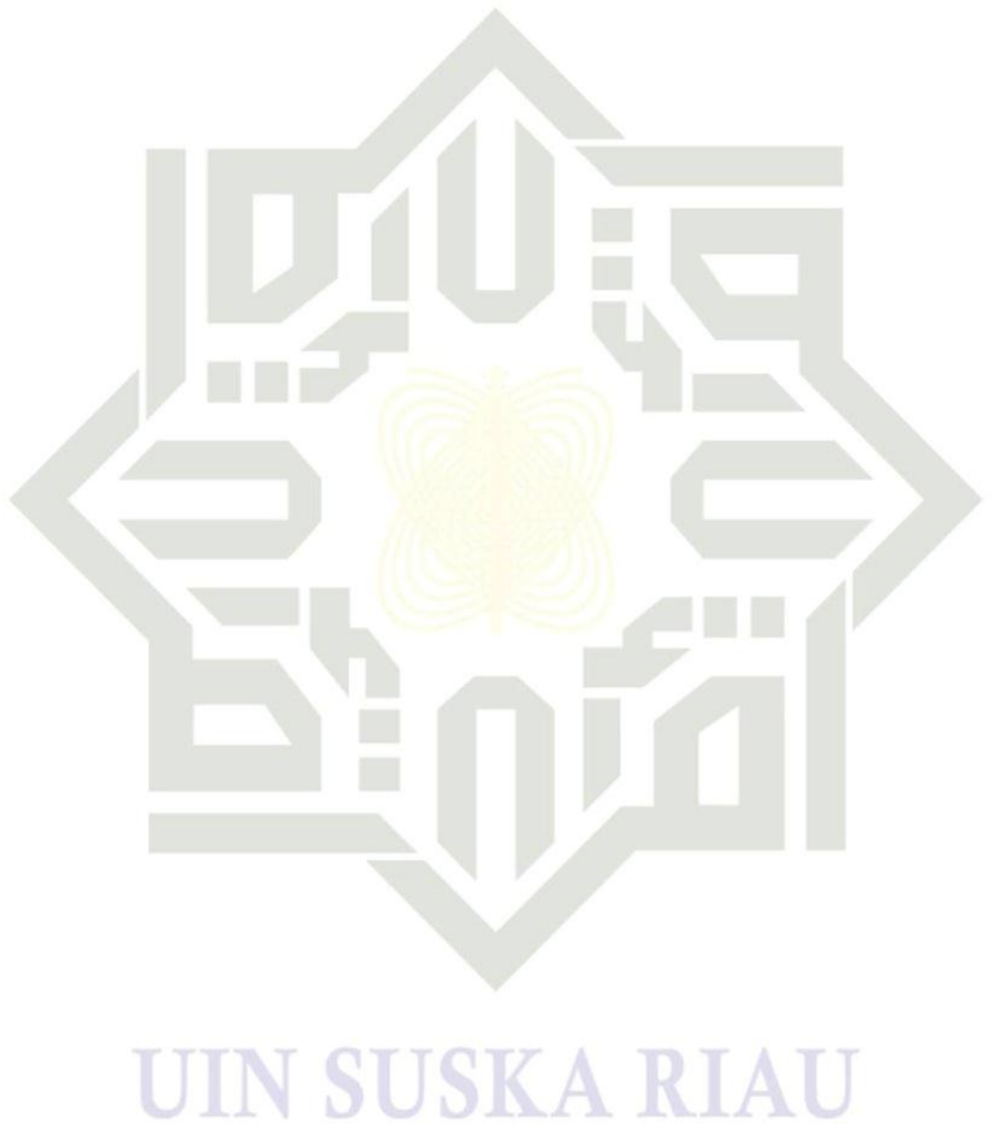
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Gedung Media Center Polda Riau
- 4.2 Struktur Polda Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Internet tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah berkembang menjadi medium utama dalam penyebaran informasi publik, termasuk informasi hukum dan keamanan. Pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif sebagai bentuk implementasi e-government, guna mewujudkan keterbukaan informasi, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Jaeger & Bertot, 2010; Nurmandi, 2018). Dalam konteks ini, website resmi instansi pemerintah menjadi salah satu instrumen strategis yang berperan penting sebagai media komunikasi publik yang bersifat resmi, cepat, dan mudah diakses.

Sebagai institusi negara yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan informasi hukum dan keamanan yang akurat, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Website resmi Polda Riau diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan kepolisian, tetapi juga sebagai media edukasi hukum, pencegahan kejahatan, serta sarana membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, berdasarkan pengamatan awal peneliti dan berbagai temuan empiris di lapangan, pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah pembaruan konten *update* yang belum konsisten. Informasi hukum dan keamanan yang disajikan pada website sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga beberapa konten menjadi tidak relevan dengan kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkini. Padahal, informasi hukum dan keamanan bersifat dinamis dan sangat bergantung pada perkembangan situasi di masyarakat. Menurut Hakim (2022), website pemerintah yang tidak diperbarui secara rutin cenderung kehilangan fungsi informatifnya dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelolanya.

Selain masalah pembaruan konten, keterbatasan interaktivitas website juga menjadi persoalan penting dalam pengelolaan website Polda Riau. Website cenderung masih berfungsi sebagai media komunikasi satu arah, di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa diberikan ruang yang memadai untuk berinteraksi, bertanya, atau memberikan umpan balik. Minimnya fitur interaktif seperti layanan pengaduan online, kolom konsultasi hukum, forum tanya jawab, atau chatbot informasi hukum menunjukkan bahwa website belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana komunikasi dua arah. Padahal, menurut Nugroho dan Yuliana (2021), interaktivitas merupakan salah satu indikator penting keberhasilan website pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya fungsi website Polda Riau sebagai media edukasi hukum bagi masyarakat. Informasi hukum yang tersedia di website sebagian besar masih disajikan dalam bentuk berita kegiatan atau rilis resmi kepolisian, sementara konten edukatif seperti penjelasan sederhana mengenai peraturan perundang-undangan, panduan hukum praktis, hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur hukum yang sering dihadapi masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, website kepolisian memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan hukum nonformal yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Santoso et al., 2022). Kurangnya konten edukasi hukum yang komunikatif dan mudah dipahami berpotensi menyebabkan masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam memahami hukum, sehingga tujuan penyebaran informasi hukum tidak tercapai secara maksimal.

Di sisi lain, dari aspek pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia, pengelolaan website Polda Riau juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen konten, koordinasi antarbagian, serta pemanfaatan fitur website yang belum maksimal. Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) menegaskan bahwa keberhasilan website pemerintah sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, kejelasan alur kerja pengelolaan

konten, serta strategi komunikasi digital yang terencana. Tanpa pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan, website hanya akan menjadi etalase informasi yang pasif dan kurang berdampak bagi masyarakat.

Apabila dikelola dengan baik, website Polda Riau dapat berfungsi sebagai media strategis untuk meningkatkan transparansi penegakan hukum, menyebarkan peringatan keamanan secara cepat, menangkal hoaks, serta membangun hubungan yang lebih terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Website juga dapat menjadi sarana pendukung community policing dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan website Polda Riau perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan merupakan persoalan yang penting dan relevan untuk diteliti. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan website sebagai media informasi, tetapi lebih jauh menelaah bagaimana strategi pengelolaan konten, tingkat pembaruan informasi, interaktivitas, serta peran website dalam menjalankan fungsi edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan website Polda Riau sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas website sebagai media komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan terpercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian ini, penulis merasa perlu menguraikan istilah istilah sebagai berikut :

1.2.1 Pengelolaan

Pengelolaan berdasarkan KBBI berasal dari kata kelola yang mempunyai makna sebuah proses, tahap, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu merumuskan kebijakan untuk memenuhi tujuan organisasi serta proses melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan.

1.2.2 Website

Website merupakan hasil perkembangan dari teknologi dan komunikasi. Website atau situs adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data berbentuk teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya yang bersifat statis maupun dinamis dan membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dan dihubungkan melalui jaringan-jaringan (hyperlink), (Abdul Kadir 2009 :10).

1.2.3 Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau, unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau, yang bertugas menagakan ketertiban, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan Markas Polda Riau berlokasi di Pekanbaru.

1.2.4 Mempublikasikan

Mempublikasikan adalah kegiatan menyampaikan, menyebarkan, atau mengumumkan suatu informasi kepada masyarakat luas melalui media tertentu sehingga informasi tersebut dapat diketahui, diakses, dan dipahami oleh publik.

Dalam konteks yang lebih spesifik, mempublikasikan berarti: mengolah informasi, menyajikannya dalam bentuk yang layak, lalu menyebarkannya secara resmi melalui media publik (misalnya website, media sosial, atau platform komunikasi lainnya).

1.2.5 Informasi dan Hukum

Informasi adalah data, fakta, atau pesan yang sudah diolah dan disampaikan sehingga memiliki makna, dapat dipahami, dan berguna bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimanya.

Informasi berfungsi membantu masyarakat memahami suatu peristiwa, mengambil keputusan, serta mengetahui perkembangan situasi atau kebijakan tertentu.

Hukum adalah serangkaian aturan, norma, dan ketentuan yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian dan keadilan.

Hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi setiap pelanggaran.

Dalam konteks publikasi informasi: “Hukum” mengacu pada aturan, kebijakan, penegakan hukum, proses hukum, serta edukasi terkait ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk disampaikan kepada masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan ditinjau dari aspek pembaruan konten, interaktivitas, dan fungsi edukasi hukum?

1.4 Tujuan Penelitian

Jadi berdasarkan pemamparan dari latar belakang, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan, khususnya terkait pembaruan konten, interaktivitas, dan fungsi edukasi hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Menurut(Tapscott,D.(2016).Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi digital, e-government, dan manajemen informasi publik. Kajian mengenai pengelolaan website instansi pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Polda Riau, memiliki relevansi yang luas dalam konteks komunikasi organisasi dan transparansi informasi publik.

Penelitian ini juga berkontribusi terhadap teori komunikasi publik, khususnya dalam memahami bagaimana institusi kepolisian menggunakan media digital untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Website sebagai media komunikasi digital berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi satu arah, tetapi juga sebagai sarana interaksi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keamanan secara lebih cepat dan akurat.(Susanto, H., & Goodwin, R. (2016)

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori e-government, yang menekankan pada bagaimana teknologi informasi digunakan dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dalam konteks Polda Riau, pengelolaan website sebagai bagian dari sistem e-government diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian dalam memberikan informasi hukum dan keamanan kepada masyarakat.

Dari perspektif manajemen komunikasi, penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana strategi komunikasi digital dapat dioptimalkan oleh instansi pemerintah dalam mengelola informasi hukum dan keamanan. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait model komunikasi digital yang efektif untuk instansi kepolisian dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik dalam konteks komunikasi digital di sektor pemerintahan maupun dalam kajian tentang efektivitas media online dalam penyampaian informasi hukum dan keamanan. Dengan adanya penelitian ini, akademisi di bidang komunikasi, administrasi publik, dan teknologi informasi dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan website instansi pemerintah secara efektif dan efisien.(Yohana, N. (2013).

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, khususnya dalam pengelolaan informasi hukum dan keamanan melalui website instansi kepolisian. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu bagi Polda Riau, bagi masyarakat, dan bagi akademisi serta peneliti di bidang komunikasi digital.

A. Bagi Polda Riau

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan website Polda Riau sebagai media informasi hukum dan keamanan. Dengan memahami strategi pengelolaan yang telah dilakukan, efektivitas penyampaian informasi, serta kendala yang

dihadapi, pihak kepolisian dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem informasi yang tersedia di website mereka.(Widodo, B. (2022).

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh Polda Riau dari penelitian ini meliputi:

- a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas,Website yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat bagi kepolisian untuk menunjukkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
- b. Optimalisasi Penyebaran Informasi,Dengan memahami bagaimana masyarakat mengakses dan menggunakan informasi di website, Polda Riau dapat menyusun strategi komunikasi digital yang lebih efektif.
- c. Peningkatan Interaksi dengan Masyarakat,Melalui website yang interaktif dan informatif, kepolisian dapat lebih mudah menerima aspirasi, keluhan, atau laporan dari masyarakat terkait hukum dan keamanan.
- d. Evaluasi dan Pengembangan Website,Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kepolisian dalam mengembangkan fitur website yang lebih user-friendly, mudah diakses, dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat.

B. Bagi Masyarakat

Sebagai pengguna utama website Polda Riau, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas informasi yang disediakan oleh kepolisian. Jika pengelolaan website ditingkatkan berdasarkan hasil penelitian ini, maka masyarakat dapat memperoleh beberapa keuntungan, seperti(Lestari,2021).

- a. Akses Informasi yang Lebih Cepat dan Akurat,Masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dan keamanan dengan lebih mudah melalui website yang dikelola dengan baik.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum,Dengan informasi hukum yang tersedia di website, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mengetahui tindakan hukum yang perlu diambil dalam situasi tertentu.
- c. Kemudahan dalam Melaporkan Kejahatan atau Pengaduan,Website yang lebih responsif dan informatif dapat menjadi sarana yang lebih efektif bagi masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal atau permasalahan hukum lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Peningkatan Keamanan Publik, Dengan informasi keamanan yang diperbarui secara berkala, masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi ancaman kejahatan dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

C. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada studi di bidang komunikasi digital, e-government, serta strategi pengelolaan informasi publik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi digital, e-government, dan pengelolaan informasi publik. Oleh karena itu, disarankan agar kajian mengenai pengelolaan website instansi pemerintah, terutama institusi kepolisian, terus dikembangkan dengan pendekatan dan perspektif yang lebih beragam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kerangka teoritis dengan mengombinasikan teori manajemen konten website pemerintah dengan teori lain, seperti teori kepercayaan publik (public trust), teori pelayanan publik digital, atau teori komunikasi organisasi. Hal ini penting agar analisis pengelolaan website tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan konten, tetapi juga pada dampaknya terhadap persepsi, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi maupun disiplin ilmu lain yang tertarik mengkaji media digital pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini mampu mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai peran website pemerintah sebagai media komunikasi publik yang strategis dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Terdahulu

Pertama dilakukan oleh D. Prathama yang membahas Strategi Pengelolaan Aplikasi Propam Polda Riau. Penelitian ini mengkaji bagaimana aplikasi Propam—baik versi website maupun aplikasi Android—dikelola sebagai media layanan pengaduan dan pelaporan pelanggaran etika internal kepolisian. Temuan utama menunjukkan bahwa pengelolaan sistem di Polda Riau memerlukan arsitektur informasi yang jelas, prosedur pemutakhiran data, serta akses publik yang mudah. Kajian ini relevan karena menampilkan bagaimana Polda Riau mengelola platform digital internal yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan.

Kedua oleh M. Wardah dkk. menelaah Pengelolaan Website sebagai Media Informasi Publik pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menyoroti praktik kerja humas pemerintah daerah dalam mengelola website, mulai dari manajemen konten, struktur organisasi humas, hingga hambatan teknis seperti keterbatasan SDM dan sarana digital. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tata kelola website pada lembaga pemerintah daerah yang dapat menjadi pembanding bagi pengelolaan website Polda Riau.

Ketiga berasal dari sebuah artikel dalam JOMFSIP yang membahas Strategi Komunikasi Humas Polda Riau dalam Penerapan Keterbukaan Informasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana Humas Polda Riau memanfaatkan website dan portal berita seperti tribratanewsriau.com untuk menyebarkan informasi terkait keamanan, kegiatan kepolisian, dan kebijakan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan publikasi informasi dipengaruhi oleh strategi komunikasi institusi serta konsistensi dalam memperbarui informasi kepada masyarakat.

Keempat dari Jurnal JUITIK mengangkat tema Pemanfaatan Media Sosial Humas Polda Riau dalam Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik. Studi ini menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga website digunakan sebagai sarana penyebaran informasi hukum dan keamanan secara cepat dan interaktif. Penelitian ini menekankan bahwa kehadiran kanal digital berkontribusi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga relevan sebagai pembeda peran website resmi Polda Riau.

Kelima yaitu penelitian mengenai Strategi Cyber Public Relations Polda Jawa Tengah yang diterbitkan melalui repository Telkom University. Studi ini menggambarkan bagaimana Polda Jawa Tengah menerapkan strategi humas digital melalui website dan berbagai platform online untuk membangun citra institusi, menangani krisis informasi, serta meningkatkan interaksi publik. Penelitian ini dapat dijadikan model strategis yang sebanding bagi Polda Riau dalam pengelolaan hubungan masyarakat berbasis digital.

Keenam oleh Ifan Sukmanda dalam repository Universitas Islam Riau menganalisis Pelayanan Publik pada Kepolisian Daerah Riau melalui studi kasus di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Penelitian ini mengevaluasi kualitas layanan publik, termasuk layanan administrasi dan informasi yang juga dipublikasikan melalui kanal online. Temuan ini relevan karena menghubungkan efektivitas pelayanan dengan ketersediaan informasi yang ditampilkan pada website resmi kepolisian.

Ketujuh oleh MCT Singaraca dari e-Journal Universitas Palangka Raya membahas Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelitian ini menelaah desain sistem, fitur, serta tata kelola portal informasi hukum yang menjadi pusat dokumentasi peraturan. Kajian ini sangat relevan bagi penelitian tentang Polda Riau karena menyangkut aspek publikasi produk hukum, navigasi dokumen, metadata, dan aksesibilitas website.

Kedelapan oleh RR Putra dalam Jurnal Dialektika membahas Inovasi Sektor Publik dalam Pengelolaan JDIH. Studi ini menyoroti tantangan literasi digital, manajemen dokumen hukum, serta rekomendasi tata kelola JDIH agar lebih efektif dalam menyajikan informasi hukum kepada publik. Temuan ini dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana Polda Riau mengelola konten hukum pada website resminya.

Kesembilan, dilakukan oleh E. Saputra, membahas Sistem Informasi Pengamanan SKCK pada Polda Riau. Penelitian ini menjelaskan alur digitalisasi layanan SKCK, mulai dari proses registrasi, pemrosesan data, hingga publikasi informasi layanan melalui sistem berbasis web. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Polda Riau sudah mulai mengadopsi sistem informasi dalam layanan hukum dan keamanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga sangat relevan sebagai contoh konkret pengelolaan layanan berbasis website.

Kesepuluh dalam jurnal Institercom (2025) mengenai Analisis Portal Layanan Berbasis Website untuk Organisasi mengkaji bagaimana portal layanan harus dirancang dari sisi antarmuka, kepuasan pengguna, dan efektivitas fitur informasi publik. Temuan utama menunjukkan bahwa portal layanan yang baik harus mudah diakses, memiliki navigasi yang jelas, dan menyajikan informasi yang lengkap serta mutakhir. Kajian ini penting untuk membandingkan kualitas pengelolaan website Polda Riau dengan standar website pelayanan publik secara umum.

2.2 Landasan Teori

Dalam konteks penelitian ini, yang berjudul “Pengelolaan Website Polda Riau dalam Mempublikasikan Informasi Hukum dan Keamanan”, kerangka teori akan menjelaskan bagaimana konsep komunikasi digital, pengelolaan website pemerintah.

2.2.1 Teori Manajemen Konten Website Pemerintah

Manajemen konten website pemerintah merupakan suatu proses pengelolaan informasi digital yang dilakukan secara sistematis oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Proses ini mencakup perencanaan, produksi, pengorganisasian, publikasi, pembaruan, serta evaluasi konten yang disajikan melalui website resmi pemerintah. Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) menyatakan bahwa website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi administratif, tetapi juga sebagai media komunikasi publik yang strategis dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. dalam konteks e-government, website pemerintah menjadi wajah digital institusi yang merepresentasikan kinerja, profesionalitas, dan keterbukaan lembaga kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan konten website tidak dapat dilakukan secara sporadis atau hanya sebagai pelengkap, melainkan harus dikelola melalui sistem manajemen konten yang terstruktur dan berkelanjutan. Jaeger (2019) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan konten website pemerintah berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. manajemen konten website pemerintah juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Website pemerintah menjadi kanal utama dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan mutakhir, termasuk informasi yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. Dalam hal ini, instansi kepolisian memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena informasi yang disampaikan berkaitan langsung dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

A. Dimensi Manajemen Konten Website Pemerintah

Berdasarkan pemikiran Bertot et al. (2010), Jaeger (2019), dan Nugroho (2021), manajemen konten website pemerintah dapat dijabarkan ke dalam beberapa dimensi utama yang digunakan sebagai indikator analisis dalam penelitian ini.

a. Pembaruan Konten (*Content Updating*)

Pembaruan konten merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan website pemerintah. Pembaruan konten merujuk pada proses penyediaan informasi terbaru secara berkala agar konten yang ditampilkan tetap relevan dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Informasi hukum dan keamanan bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga menuntut pembaruan yang cepat dan berkelanjutan.

Menurut Hakim (2022), website pemerintah yang tidak melakukan pembaruan konten secara konsisten berpotensi menyajikan informasi yang tidak lagi relevan dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dalam konteks kepolisian, keterlambatan pembaruan informasi hukum dan keamanan dapat berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang.

b. Interaktivitas Website

Interaktivitas merupakan indikator penting dalam manajemen konten website pemerintah yang menunjukkan sejauh mana website mampu memfasilitasi komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Website yang interaktif menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan pengaduan secara langsung. Nugroho dan Yuliana (2021) menjelaskan bahwa rendahnya interaktivitas website pemerintah menunjukkan bahwa website masih digunakan sebagai media komunikasi satu arah. Dalam konteks kepolisian, interaktivitas website

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penting untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dan responsif antara aparat kepolisian dan masyarakat.

c. Fungsi Edukasi Hukum

Website pemerintah, khususnya website kepolisian, memiliki potensi besar sebagai media edukasi hukum bagi masyarakat. Edukasi hukum melalui website bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, serta hak dan kewajiban warga negara.

Santoso et al. (2022) menyatakan bahwa website pemerintah sering kali belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi hukum karena konten hukum masih disajikan dalam bahasa yang formal dan kurang komunikatif. Oleh karena itu, manajemen konten website pemerintah perlu memperhatikan penyajian informasi hukum yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

d. Aksesibilitas dan Kemudahan Informasi

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi yang tersedia di website pemerintah. Website yang dikelola dengan baik harus memiliki struktur navigasi yang jelas, tampilan yang ramah pengguna, serta bahasa yang mudah dipahami.

Jaeger (2019) menekankan bahwa aksesibilitas merupakan bagian integral dari manajemen konten website pemerintah, karena informasi publik yang sulit diakses atau dipahami tetap tidak efektif meskipun tersedia secara daring. Dalam konteks penelitian ini, aksesibilitas menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan website Polda Riau dalam menyampaikan informasi hukum dan keamanan.

2.2.2 Teori Komunikasi Digital

Teori komunikasi digital menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung melalui media berbasis teknologi digital, seperti website, media sosial, dan platform daring lainnya. McQuail (2010) menyatakan bahwa komunikasi digital memiliki karakteristik utama berupa kecepatan penyebaran informasi, jangkauan yang luas, serta adanya peluang interaksi antara komunikator dan komunikan. dalam komunikasi digital, pesan tidak lagi bersifat linear seperti pada media konvensional, tetapi bersifat interaktif dan multimodal. Website pemerintah sebagai media komunikasi digital memungkinkan institusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah untuk menyampaikan informasi hukum dan keamanan secara cepat dan real-time, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Teori komunikasi digital digunakan dalam penelitian ini sebagai teori pendukung untuk memperkuat analisis aspek interaktivitas dan penyampaian pesan pada website Polda Riau. Menurut McQuail (2010), efektivitas komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara pesan disampaikan dan sejauh mana audiens dapat berinteraksi dengan pesan tersebut. dalam konteks website kepolisian, komunikasi digital berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang transparan, responsif, dan mudah diakses. Website yang dikelola dengan prinsip komunikasi digital yang baik mampu menjadi sarana dialog antara kepolisian dan masyarakat, bukan sekadar media penyampaian informasi satu arah.

2.3 Konsep Pengelolaan Website Polda Riau sebagai Website Pemerintah

A. Pengertian Konsep Pengelolaan Website Pemerintah

Pengelolaan website pemerintah merupakan serangkaian proses terencana yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mengelola media digital resmi untuk menyampaikan informasi publik, pelayanan, serta komunikasi dua arah dengan masyarakat. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi konten website agar sesuai dengan prinsip e-government, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks Polda Riau, pengelolaan website diarahkan untuk mendukung fungsi kepolisian sebagai penyedia informasi hukum dan keamanan, media edukasi hukum, serta sarana membangun transparansi dan kepercayaan publik.

B. Tujuan Pengelolaan Website Polda Riau

Pengelolaan website Polda Riau bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi hukum dan keamanan yang akurat, resmi, dan terpercaya.
2. Mendukung keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
3. Meningkatkan fungsi website sebagai media komunikasi publik digital.
4. Menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

C. Prinsip Pengelolaan Website Pemerintah

Pengelolaan website Polda Riau harus berlandaskan prinsip website pemerintah, yaitu:

1. Transparansi: Informasi disampaikan secara terbuka dan dapat diakses publik.
2. Akuntabilitas: Informasi dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.
3. Akurasi: Konten berdasarkan data dan kebijakan resmi.
4. Aktualitas: Informasi diperbarui secara berkala.
5. Aksesibilitas: Mudah diakses dan dipahami masyarakat.
6. Interaktivitas: Memberikan ruang komunikasi dua arah.

D. Komponen Konsep Pengelolaan Website Polda Riau

Konsep pengelolaan website Polda Riau mengacu pada manajemen konten website pemerintah, yang terdiri dari empat komponen utama:

1. Pembaruan Konten (Content Updating)

Pembaruan konten merupakan inti pengelolaan website pemerintah. Website Polda Riau harus dikelola dengan sistem pembaruan informasi hukum dan keamanan secara rutin dan terencana.

Bentuk pengelolaan pembaruan konten meliputi:

- a. Penyusunan jadwal publikasi konten hukum dan keamanan.
- b. Proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan.
- c. Konsistensi unggahan berita, rilis, dan informasi hukum.
- d. Penyesuaian konten dengan kondisi keamanan aktual di masyarakat.
- e. Pembaruan konten ini penting agar website tidak menjadi arsip pasif, tetapi berfungsi sebagai sumber informasi yang relevan dan aktual.

2. Interaktivitas Website

Website pemerintah ideal tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif. Pengelolaan website Polda Riau harus memfasilitasi komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat.

Bentuk interaktivitas yang dikelola antara lain:

- a. Penyediaan fitur kontak, pengaduan, atau kanal aspirasi masyarakat.
- b. Respons terhadap pertanyaan atau masukan publik.
- c. Integrasi website dengan media sosial resmi Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyajian informasi yang mendorong partisipasi masyarakat.
- f. Interaktivitas ini mendukung konsep komunikasi digital modern, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai partisipan aktif.

3. Fungsi Edukasi Hukum

Website Polda Riau memiliki peran strategis sebagai media edukasi hukum. Oleh karena itu, pengelolaan website harus diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan keamanan.

Pengelolaan fungsi edukasi hukum dilakukan melalui:

- a. Penyajian konten hukum dalam bahasa yang sederhana dan komunikatif.
- b. Penjelasan prosedur hukum yang sering dihadapi masyarakat.
- c. Informasi hak dan kewajiban warga negara.
- d. Konten pencegahan kejahatan dan keamanan masyarakat.
- e. Dengan pengelolaan ini, website Polda Riau tidak hanya menyampaikan berita kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum nonformal.

E. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan website pemerintah. Website Polda Riau harus dikelola agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan aksesibilitas meliputi:

- a. Struktur menu dan navigasi yang jelas.
- b. Tampilan website yang ramah pengguna.
- c. Bahasa informasi yang mudah dipahami.
- d. Kemudahan pencarian informasi hukum dan keamanan.
- e. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi serta pemanfaatan website oleh masyarakat.

F. Alur Konsep Pengelolaan Website Polda Riau

Secara konseptual, pengelolaan website Polda Riau dapat digambarkan dalam alur berikut:

a. Perencanaan Konten

Penentuan jenis informasi hukum dan keamanan yang akan dipublikasikan.

b. Produksi dan Verifikasi Konten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan konten oleh humas dan verifikasi oleh pihak berwenang.

c. Publikasi Konten

Penyampaian informasi melalui website resmi Polda Riau.

d. Interaksi Publik

Masyarakat mengakses, merespons, dan memberikan umpan balik.

e. Evaluasi dan Pembaruan

Penilaian efektivitas konten dan perbaikan pengelolaan website.

2.4 Konsep Website Pemerintah

2.4.1 Pengertian Website Pemerintah

Website pemerintah merupakan media komunikasi digital resmi yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagai sarana penyampaian informasi, pelayanan publik, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Website pemerintah berfungsi sebagai representasi institusi di ruang digital yang memuat informasi kebijakan, program kerja, regulasi, serta berbagai aktivitas pemerintahan. Menurut Nugroho (2021), website pemerintah menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan e-government karena memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara cepat, terbuka, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan modern, website tidak hanya berperan sebagai papan pengumuman digital, tetapi juga sebagai media komunikasi dua arah yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Website pemerintah harus dikelola secara profesional agar mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta mendukung kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

2.4.2 Fungsi Website Pemerintah

Website pemerintah memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pertama, website berfungsi sebagai media informasi publik yang menyediakan data, kebijakan, peraturan, dan kegiatan institusi secara resmi. Kedua, website berfungsi sebagai sarana pelayanan publik digital, seperti pengaduan masyarakat, permohonan informasi, dan akses layanan administratif. Ketiga, website berfungsi sebagai media komunikasi dan edukasi, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan, hukum, dan keamanan.

Selain itu, website pemerintah juga berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Melalui publikasi informasi yang terbuka dan mudah diakses, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip good governance. Website yang dikelola dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik.

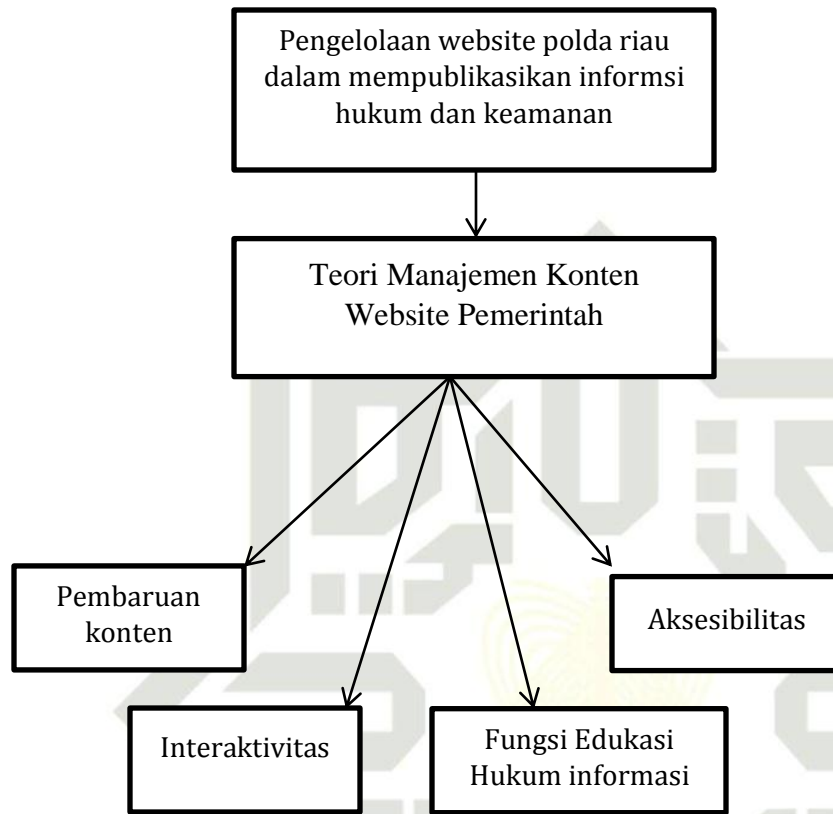
2.4.3 Karakteristik Website Pemerintah Ideal

Website pemerintah yang ideal harus memenuhi beberapa karakteristik utama. Pertama, akurat dan terpercaya, yaitu menyajikan informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, mudah diakses, baik dari segi tampilan, navigasi, maupun kompatibilitas dengan berbagai perangkat digital. Ketiga, interaktif, yaitu menyediakan ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, website pemerintah juga harus memiliki pembaruan konten yang berkelanjutan agar informasi yang disajikan tetap relevan. Transparansi informasi menjadi karakteristik penting lainnya, khususnya dalam penyampaian kebijakan publik, regulasi, dan layanan masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, website pemerintah dapat berfungsi secara optimal sebagai media komunikasi publik dan pelayanan digital.

2.5. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori manajemen konten website pemerintah, penelitian ini memandang website Polda Riau sebagai media komunikasi publik yang pengelolaannya dapat dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu pembaruan konten, interaktivitas, fungsi edukasi hukum, dan aksesibilitas informasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana website Polda Riau telah menjalankan fungsinya dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan kepada masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.6 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pengelolaan Website Polda Riau dalam Mempublikasikan Informasi Hukum dan Keamanan	Pembaruan Konten	Proses pengelolaan website Polda Riau dalam memperbarui informasi hukum dan keamanan yang	Pengelola website Polda Riau, dokumentasi website	Wawancara, observasi, dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		meliputi frekuensi pembaruan, konsistensi unggahan, ketepatan waktu publikasi, serta kesesuaian informasi dengan kondisi aktual		
	Interaktivitas Website	Kemampuan website Polda Riau dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara institusi kepolisian dan masyarakat, yang meliputi ketersediaan fitur interaksi, respons pengelola, serta partisipasi masyarakat	Pengelola website Polda Riau, pengguna website	Wawancara, observasi
	Fungsi Edukasi Hukum	Peran website Polda Riau dalam memberikan pemahaman hukum dan keamanan kepada masyarakat melalui konten edukatif,	Konten website Polda Riau, pengelola website	Wawancara, observasi, dokumentasi

		penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta manfaat informasi bagi peningkatan kesadaran hukum		
	Aksesibilitas Informasi	Tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, menemukan, dan memahami informasi hukum dan keamanan melalui website Polda Riau, yang mencakup navigasi, struktur informasi, dan tampilan website	Website Polda Riau, pengguna website	Observasi, dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara rinci berdasarkan perspektif subjek penelitian. Sementara itu, studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mengkaji suatu fenomena secara mendalam dan kontekstual pada satu objek tertentu. Dalam penelitian ini, website Polda Riau diposisikan sebagai satu kasus yang dikaji secara intensif untuk memahami praktik pengelolaannya dalam konteks institusi kepolisian daerah.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada deskripsi dan analisis mendalam terhadap pengelolaan website Polda Riau, khususnya terkait pembaruan konten, interaktivitas, fungsi edukasi hukum, dan aksesibilitas informasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Riau, khususnya pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website resmi Polda Riau, yaitu bidang kehumasan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan fokus kajian, yakni pengelolaan website sebagai media publikasi informasi hukum dan keamanan.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan september sampai dengan november, yang meliputi tahap pengumpulan data, observasi website, wawancara informan, serta analisis data penelitian.

3.3 Subjek Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu dalam organisasi memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan website Polda Riau.

3.3.1 Kriteria Informan

Kriteria informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan website Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui proses perencanaan, pengelolaan, dan publikasi konten website.
- c. Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyajian informasi hukum dan keamanan.
- d. Bersedia memberikan informasi secara mendalam dan terbuka.
Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri dari:
 - a. Pengelola atau administrator website Polda Riau,
 - b. Personel bidang kehumasan yang bertanggung jawab terhadap publikasi konten,
 - c. Pihak terkait yang memahami kebijakan komunikasi publik Polda Riau.

Justifikasi pemilihan informan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa purposive sampling dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dari subjek yang paling memahami fenomena yang diteliti.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di Lapangan.

Sumber data primer bisa berbentuk pendapat objek penelitian atau orang secara individu atau kelompok. Maka dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil langsung dari wawancara dan observasi mengenai Manajemen Pengelola Website polda riau dalam mempublikasi informasi hukum dan keamanan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dan pembantu yang di dapatkan untuk melengkapi data penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk buku-buku, catatan-catatan, laporan, dokumen dan arsip-arsip serta website Jadi untuk mendukung sumber data yang didapatkan dalam penelitian, maka peneliti mendapatkan data berbentuk laporan, dokumen, website dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah peneliti yakni bagaimana pengelola website polda riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 informasi Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian atau seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Dalam penelitian, penulis menentukan informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang Dalam penelitian.

No	NAMA	JABATAN
1	Bapak Antoni	Staff Multi Media
2	Kak Umiil	Staff Penmas
3	Kak Nurul	Staff Dokumentasi
4	Kak Eva Susanti Nasution	Staff Bagian Umum
5	Ibu Mida Nainggolan	Staff Penmas
6	Bapak Rudi Samosir	Kasubdib Penmas

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

3.6.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan terpilih untuk menggali informasi terkait proses pengelolaan website Polda Riau, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan. Wawancara dilakukan secara langsung dan dicatat dalam bentuk transkrip untuk keperluan analisis data.

3.6.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung konten dan fitur yang terdapat pada website Polda Riau. Observasi difokuskan pada frekuensi pembaruan konten, jenis informasi hukum dan keamanan yang disajikan, tingkat interaktivitas, serta kemudahan akses informasi bagi pengguna.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, tangkapan layar website, pedoman pengelolaan website, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi.

Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pengalaman informan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik, yaitu teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola atau tema yang muncul dari data penelitian.

Proses analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- a. Pengumpulan dan Transkripsi Data
Data hasil wawancara dan observasi dikumpulkan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keaslian informasi.
- b. Membaca dan Memahami Data
Peneliti membaca seluruh data secara berulang untuk memahami konteks dan makna keseluruhan data.
- c. Pengelompokan Tema
Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan temuan penelitian.
- d. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan
Tema-tema yang telah terbentuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori manajemen konten website pemerintah dan teori komunikasi digital.

Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari data kualitatif secara sistematis dan transparan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Media Center Polda Riau

Media Center Polda Riau lahir sebagai bagian dari transformasi fungsi kehumasan Polri dalam merespons tuntutan keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi komunikasi. Secara kelembagaan, Media Center Polda Riau berada di bawah Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Riau dan berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi resmi institusi kepolisian di wilayah Provinsi Riau.

Pada tahap awal, fungsi komunikasi publik di Polda Riau masih dilaksanakan secara konvensional, yaitu melalui rilis pers tertulis, konferensi pers langsung, serta kerja sama dengan media cetak, radio, dan televisi lokal. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih bersifat satu arah dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kebijakan internal Polri terkait penguatan peran kehumasan, Polda Riau mulai membentuk dan memfungsikan Media Center sebagai pusat layanan informasi. Media Center ini dirancang untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas publikasi, dokumentasi, dan distribusi informasi hukum serta keamanan secara terpusat dan terkontrol.

Dalam perkembangannya, Media Center Polda Riau tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja kehumasan, tetapi juga sebagai pusat produksi konten informasi, meliputi penulisan berita, pengelolaan dokumentasi foto dan video, peliputan kegiatan kepolisian, serta penyebaran informasi melalui website resmi Polda Riau dan media sosial institusi. Media Center juga menjadi sarana utama dalam menjalin hubungan dengan media massa serta sebagai kanal klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Penguatan peran Media Center Polda Riau semakin terlihat seiring diterapkannya kebijakan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Dalam konteks ini, Media Center berperan strategis dalam mendukung transparansi kinerja kepolisian, membangun kepercayaan publik, serta menyampaikan informasi hukum dan keamanan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Hingga saat ini, Media Center Polda Riau terus dikembangkan baik dari sisi sumber daya manusia, sistem kerja, maupun pemanfaatan teknologi digital, guna menyesuaikan dengan dinamika komunikasi publik dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Gambar 4.1

Gedung Media Center Polda Riau



Sumber <https://news.detik.com>

© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

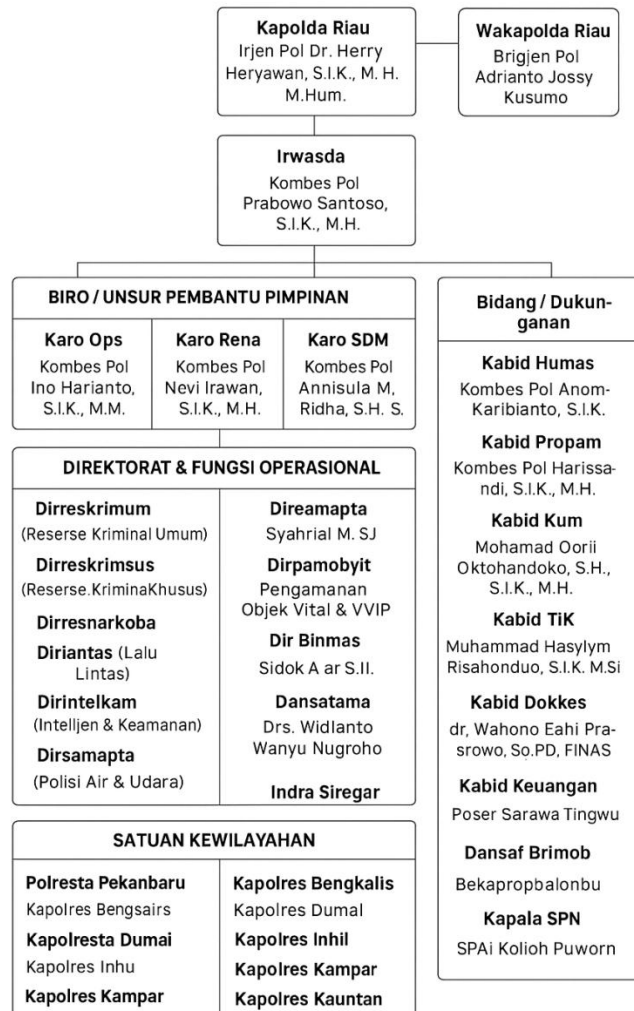
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI POLDA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Tugas dan Fungsi Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau

4.2.1 Peran Bidang Humas dalam Publikasi Digital

Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Riau memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga komunikasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat. Di era digital, peran humas tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi melalui media konvensional, tetapi juga mencakup pengelolaan media digital, termasuk website resmi Polda Riau. Website menjadi salah satu kanal utama publikasi digital yang digunakan humas untuk menyampaikan informasi hukum dan keamanan kepada masyarakat secara cepat dan luas. Sebagai pengelola komunikasi publik, humas bertanggung jawab memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan melalui website bersifat informatif, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Publikasi digital yang dilakukan oleh humas bertujuan untuk meningkatkan transparansi institusi, membangun citra positif kepolisian, serta menumbuhkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, humas berperan sebagai penghubung antara kebijakan institusi dengan masyarakat melalui penyajian informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja.

Selain itu, humas juga berperan dalam mengelola narasi dan framing informasi yang dipublikasikan di website. Informasi hukum dan keamanan harus disusun dengan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi digital melalui website tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan komunikatif.

4.2.2 Kewenangan pengelolaan website Polda Riau

Kewenangan pengelolaan website Polda Riau berada di bawah koordinasi Bidang Hubungan Masyarakat, khususnya pada unit atau subbagian yang menangani dokumentasi dan publikasi informasi. Humas memiliki kewenangan dalam menentukan jenis informasi yang layak dipublikasikan, waktu publikasi, serta bentuk penyajian konten agar sesuai dengan kebijakan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan website tidak sepenuhnya dilakukan secara individual, melainkan melibatkan koordinasi dengan satuan kerja lain di lingkungan Polda Riau. Setiap satuan kerja memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk menyampaikan informasi kegiatan atau data pendukung kepada humas, namun keputusan akhir terkait publikasi tetap berada pada pengelola website di bawah kendali humas. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi informasi serta memastikan akurasi dan validitas konten yang dipublikasikan.

Kewenangan humas dalam pengelolaan website juga mencakup pengawasan terhadap konten yang telah dipublikasikan. Jika terdapat informasi yang perlu diperbarui, dikoreksi, atau ditarik kembali, humas bertanggung jawab melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kebijakan institusi.

4.3 Alur Pengelolaan Website Polda Riau

4.3.1 Proses Pengelolaan Informasi hingga Publikasi

Alur pengelolaan website Polda Riau dimulai dari proses pengumpulan informasi yang berasal dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Riau. Informasi tersebut dapat berupa kegiatan kepolisian, kebijakan institusi, imbauan keamanan, maupun informasi hukum yang relevan bagi masyarakat. Setelah informasi diterima, humas melakukan proses verifikasi awal untuk memastikan kebenaran data dan kelayakan informasi untuk dipublikasikan. Tahap berikutnya adalah penyusunan rilis atau naskah publikasi. Pada tahap ini, informasi yang telah diverifikasi disusun dalam format yang sesuai dengan standar penulisan website, menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Rilis yang telah disusun kemudian melalui proses persetujuan internal sebelum diunggah ke website resmi Polda Riau.

Setelah memperoleh persetujuan, konten diunggah ke website oleh pengelola teknis. Tahap unggah ini mencakup pengaturan judul, kategori, waktu publikasi, serta penyesuaian tampilan agar konten mudah diakses oleh pengunjung website. Selanjutnya, informasi yang telah dipublikasikan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

4.3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Website

Pengelolaan website Polda Riau melibatkan beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Bidang Humas berperan sebagai koordinator utama yang mengatur alur informasi, menentukan kebijakan

publikasi, serta memastikan kesesuaian konten dengan prinsip komunikasi publik dan ketentuan hukum. Pengelola website atau admin teknis bertanggung jawab pada aspek teknis pengunggahan dan pemeliharaan website. Selain itu, satuan kerja lain di lingkungan Polda Riau berperan sebagai penyedia informasi atau sumber data. Koordinasi antar pihak ini menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran alur pengelolaan website. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, proses publikasi informasi hukum dan keamanan melalui website dapat berjalan secara sistematis, terkontrol, dan akuntabel.

Alur pengelolaan website yang terstruktur menunjukkan bahwa website Polda Riau tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem komunikasi organisasi yang mendukung transparansi dan pelayanan informasi publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis menggunakan teori manajemen konten website pemerintah dan teori komunikasi digital, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan website Polda Riau dalam mempublikasikan informasi hukum dan keamanan belum sepenuhnya optimal. Website telah berfungsi sebagai media informasi resmi institusi, namun belum secara maksimal menjalankan perannya sebagai media komunikasi publik yang interaktif dan edukatif. dari aspek pembaruan konten, website Polda Riau masih menunjukkan ketergantungan pada rilis satuan kerja tanpa perencanaan pembaruan konten yang terjadwal. Hal ini menyebabkan informasi hukum dan keamanan yang disajikan belum selalu mencerminkan dinamika kondisi lapangan. Dari aspek interaktivitas, website cenderung berfungsi sebagai media komunikasi satu arah, sehingga potensi partisipasi dan dialog dengan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, fungsi website sebagai media edukasi hukum masih terbatas karena dominasi konten kegiatan institusi dibandingkan konten edukatif yang berorientasi pada pemahaman masyarakat.

secara teoritis, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan website Polda Riau dengan prinsip manajemen konten website pemerintah yang menekankan pembaruan konten, interaktivitas, dan fungsi edukasi publik. Dengan demikian, website Polda Riau belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai media komunikasi publik yang ideal dalam konteks e-government.

6.2 Kontribusi Ilmiah Penelitian

Publik strategis yang dikelola berdasarkan prinsip manajemen konten yang Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya kajian komunikasi pemerintahan dan komunikasi digital, dengan menegaskan bahwa pengelolaan website kepolisian tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas teknis publikasi informasi. Website pemerintah harus diposisikan sebagai instrumen komunikasi sistematis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat relevansi teori manajemen konten website pemerintah dalam konteks institusi kepolisian daerah yang memiliki karakteristik informasi hukum dan keamanan yang dinamis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori komunikasi digital berperan penting dalam menjelaskan rendahnya interaktivitas website pemerintah meskipun infrastruktur digital telah tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara empiris, penelitian ini menambah referensi penelitian tentang pengelolaan website kepolisian di tingkat daerah, yang selama ini masih relatif terbatas. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji komunikasi publik institusi penegak hukum di era digital.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu objek penelitian, yaitu website Polda Riau, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh website kepolisian di Indonesia. Kedua, data penelitian diperoleh dari jumlah informan yang terbatas, sehingga perspektif yang diperoleh masih didominasi oleh sudut pandang pengelola website. Ketiga, penelitian ini belum melibatkan perspektif pengguna atau masyarakat sebagai penerima informasi website, sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh efektivitas website dari sudut pandang publik. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek teknis pengembangan website, seperti sistem manajemen konten atau desain antarmuka pengguna.

6.4 Arah Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan melibatkan lebih banyak objek penelitian, seperti perbandingan pengelolaan website antar kepolisian daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap website kepolisian sebagai media informasi hukum dan keamanan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas website pemerintah. Kajian mengenai integrasi website dengan media sosial serta pengembangan konten edukasi hukum berbasis digital juga menjadi arah penelitian yang relevan untuk dikembangkan di masa mendatang.

6.5 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang dibagi ke dalam saran praktis, saran akademik, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

6.5.1 Saran Praktis

Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau disarankan untuk menyusun perencanaan pembaruan konten website secara rutin dan terjadwal, khususnya terkait informasi hukum dan keamanan yang bersifat edukatif dan preventif. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan

fitur interaktif pada website agar masyarakat dapat memberikan umpan balik atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Pengelompokan dan pengarsipan informasi hukum juga perlu ditata secara sistematis agar mudah diakses oleh masyarakat.

6.5.2 Saran Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan humas pemerintahan berbasis digital. Peneliti selanjutnya dapat memperkaya kajian teoritis dengan menggunakan perspektif komunikasi partisipatif atau cyber public relations untuk menganalisis pengelolaan website pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G., et al. (2023). Interactivity on government digital platforms. *COMMENTATE Journal*, 4(1), 22–35.
- Alharbi, A., et al. (2016). Citizen trust in e-government websites. *Electronic Government Journal*, 12(1), 1–15.
- Ananda, R., & Wijaya, I. (2021). Website pemerintah dan akses informasi publik. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 6(2), 60–72.
- Arifin, E. (2020). Humas pemerintah di era digital. *Jurnal Public Relations Indonesia*, 5(2), 45–58.
- Arifin, M., & Wahyudi, T. (2023). Keterbatasan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Website Pemerintah di Indonesia.
- Azhary, S., & Kriyantono, R. (2025). Online public relations and information transparency in public institutions. *Jurnal Pekommas*, 10(1), 1–14.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2015). Trust and e-government. *Government Information Quarterly*, 32(4), 364–372.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2018). Using ICTs to create transparency. *Government Information Quarterly*, 35(2), 264–271.
- Derivanti, A. (2022). Digital public relations pemerintah dalam penyediaan informasi publik. *COMMENTATE Journal*, 3(2), 85–98.
- Fauzi, M. (2023). Optimalisasi website pemerintah dalam pelayanan informasi. *Jurnal E-Government*, 5(1), 1–12.
- Fitria, A. (2021). Website sebagai sarana humas pemerintah. *Jurnal Media Informasi*, 3(2), 55–67.
- Gil-Garcia, J. R. (2018). Digital government success factors. *Government Information Quarterly*, 35(2), 190–202.
- Hakim, A. (2022). Peran Chatbot Berbasis AI dalam Meningkatkan Interaksi Masyarakat dengan Website Pemerintah.
- Handayani, S. (2020). Cyber PR dan citra institusi publik. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 4(2), 99–111.
- Hasana, U., & Fadhlain, S. (2023). Pengelolaan website dinas komunikasi dan informatika sebagai media informasi publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(2), 145–156.
- Heeks, R. (2020). E-government and development. *Information Technology for Development*, 26(1), 1–18.
- Hidayah, N. (2019). Website pemerintah sebagai media komunikasi digital. *Jurnal Komunikasi Digital*, 3(1), 15–26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iskandar, M., & Husna, A. (2024). Cyber public relations dalam pengelolaan website pemerintah daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(2), 345–356.
- Jaeger, P. T. (2019). Transparency in government websites. *Information Polity*, 24(1), 1–12.
- Kim, S., & Lee, J. (2019). E-government, transparency, and trust. *Public Administration Review*, 79(4), 570–581.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*.
- Kriyantono, R. (2018). Public relations digital dalam organisasi publik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(1), 1–12.
- Kurniawan, A., & Lestari, E. (2020). Efektivitas website pemerintah dalam penyampaian informasi publik. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 99–111.
- Latifah, L., & Elfiandri. (2023). Manajemen pengelola website pemerintah daerah sebagai media informasi publik. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 12–23.
- Lestari, D. (2020). Pengelolaan website sebagai media pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 44–56.
- Lestari, F. (2021). Hubungan antara Kualitas Website Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.
- Linders, D. (2020). Public participation and digital government. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101–112.
- Margetts, H., et al. (2019). Digital era governance. *Oxford Internet Institute Journal*, 6(1), 1–15.
- Maulida, R., & Prasetyo, B. (2022). Strategi pengelolaan website instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 88–101.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory*. SAGE Publications.
- Meijer, A. (2018). Transparency through digital platforms. *Public Administration Review*, 78(2), 198–209.
- Misran, M., et al. (2021). Government websites as communication tools. *Journal of Society and Media*, 5(2), 120–134.
- Moon, M. J. (2020). E-government and public administration. *Public Performance & Management Review*, 43(2), 349–368.
- Nam, T. (2019). Government transparency and ICT. *Social Science Computer Review*, 37(3), 351–366.
- Norris, D. F., & Reddick, C. G. (2019). Local e-government and trust. *Public Administration Review*, 79(3), 389–400.
- Nugroho, A., & Yuliana, R. (2021). Website pemerintah sebagai sarana transparansi informasi publik. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 101–112.
- Nugroho, R. (2021). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurmandi, A. (2018). E-government dan pelayanan publik digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–15.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*.
- Pradana, A. (2022). Optimalisasi peran humas melalui website resmi pemerintah. *Jurnal Media Relations*, 6(1), 21–34.
- Prasetyo, E., & Mazya, T. M. (2024). Digital governance in online public services. *Jurnal Governansi*, 9(2), 101–115.
- Prastiwi, N. A., Kholil, S., & Sumanti, S. T. (2022). Pengelolaan website pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik. *SIBATIK Journal*, 1(6), 989–998.
- Putra, R. (2020). Humas pemerintah dan keterbukaan informasi. *Jurnal Informasi Publik*, 4(1), 40–52.
- Putri, Y. A. (2023). Peran humas pemerintah dalam pengelolaan website sebagai media informasi publik. *Journal of Communication Management and Organization*, 2(1), 45–56.
- Rahmawati, D., & Kriyantono, R. (2020). Media digital pemerintah dan kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 50–64.
- Ramadhan, M. (2023). Peran humas pemerintah dalam era media digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(1), 12–25.
- Sari, F., & Nugraha, A. (2021). Strategi humas digital pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 140–153.
- Sari, N., & Hidayat, D. (2019). Website pemerintah dan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 131–144.
- Setiawan, R., Nilamsari, N., & Hamzah, R. E. (2024). Implementasi cyber public relations pada website kementerian. *Jurnal Cyber PR*, 3(1), 1–14.
- Setyawan, B. (2019). Website sebagai media komunikasi organisasi publik. *Jurnal Public Relations*, 4(1), 22–34.
- Susanto, H., & Goodwin, R. (2016). *Governance in E-Government: Cybersecurity Risk and Management Strategies*.
- Tapscott, D. (2016). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2019). The effects of e-government on trust. *American Review of Public Administration*, 39(3), 354–369.
- United Nations. (2022). Digital government and public information. *UN E-Government Survey Journal*, 1–20.
- Utami, P. (2019). Digitalisasi humas pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 70–82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahyuni, S. (2022). Strategi komunikasi digital humas pemerintah. *Jurnal Komunikasi Strategis*, 5(1), 1–13.
- West, D. M. (2018). Digital government and public trust. *Public Administration Review*, 78(2), 187–197.
- Widodo, B. (2022). Pengembangan Model Pengelolaan Website Pemerintah yang Efektif.
- Wulandari, P. (2021). Pengelolaan konten website pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 67–78.
- Yohana, N. (2013). Pengelolaan Website sebagai E-Government oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Yusri, D. (2019). Peran humas dalam pengelolaan informasi publik. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 2(1), 33–45.

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

PENGELOLAAN WEBSITE POLDA RIAU DALAM MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI HUKUM DAN KEAMANAN

Pertanyaan untuk Pengelola Website Polda Riau

1. Bagaimana proses kerja dalam mengelola dan memperbarui website Polda Riau setiap harinya?
2. Apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan website?
3. Bagaimana cara memastikan informasi hukum dan keamanan yang dipublikasikan tetap akurat dan valid?
4. Bagaimana koordinasi antara pengelola website dan Divisi Penmas dalam proses publikasi informasi?
5. Bagaimana standar atau pedoman internal yang digunakan dalam mengelola konten website?

Pertanyaan untuk Admin Konten

1. Bagaimana alur pembuatan dan pengunggahan konten ke website Polda Riau?
2. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan konten yang layak dipublikasikan?
3. Bagaimana peran admin konten dalam menjaga kualitas informasi yang diunggah?
4. Seberapa sering konten hukum dan keamanan diperbarui dalam website?
5. Apa jenis konten yang paling banyak diminati masyarakat berdasarkan pengalaman Anda?
6. Apakah ada evaluasi rutin untuk menilai efektivitas konten yang dipublikasikan?

Pertanyaan untuk Anggota Divisi Penmas (Pembuat Informasi Publik)

1. Bagaimana proses pengumpulan data sebelum informasi hukum atau keamanan dipublikasikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa peran Divisi Penmas dalam menjamin informasi yang disampaikan kepada publik bersifat kredibel?
3. Bagaimana koordinasi antara Penmas dan bidang-bidang lain ketika ada peristiwa penting?
4. Apa standar komunikasi yang digunakan saat membuat rilis informasi resmi?
5. Apa hambatan yang paling sering muncul dalam proses publikasi cepat dan akurat?

Pertanyaan untuk Staf Dokumentasi & Liputan

1. Bagaimana proses pengambilan dokumentasi sebelum dipublikasikan di website?
2. Apa saja tantangan dalam menyediakan foto atau video yang layak tayang?
3. Bagaimana koordinasi staf dokumentasi dengan admin konten atau Penmas?
4. Bagaimana Anda memastikan dokumentasi yang diunggah tidak melanggar privasi atau aturan hukum?
5. Seberapa cepat dokumentasi harus disiapkan untuk publikasi?

Pertanyaan untuk Staf IT/Programmer Website

1. Bagaimana Anda menjaga keamanan website dari ancaman siber?
2. Bagaimana prosedur pemeliharaan rutin website Polda Riau?
3. Apa tantangan teknis terbesar dalam mempertahankan performa website?
4. Bagaimana Anda memastikan website tetap responsif dan mudah diakses masyarakat?
5. Apakah ada fitur yang sedang dikembangkan untuk peningkatan layanan publik?

Pertanyaan untuk Pimpinan Subbag Humas atau Kepala Penmas

1. Bagaimana Anda menilai efektivitas website sebagai sarana transparansi publik?
2. Apa strategi utama Humas dalam mengelola informasi hukum dan keamanan?
3. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas dan akurasi konten yang dipublikasikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa indikator keberhasilan dalam pengelolaan website menurut Anda?
5. Bagaimana peran website dalam membangun citra positif Polda Riau?

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

